



► **MASALAH LINGKUNGAN**

Tangani Sampah, Pemda DIY Minta Bantuan Pusat

Yosef Leon & Aifi Annissa Karin
redaksi@harianjogja.com

JOGJA—Darurat sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum terselesaikan. Pemda DIY mengusulkan permintaan bantuan anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menangani persoalan sampah.

Proposal bantuan itu dibutuhkan agar anggaran lain yang telah disusun tidak diganggu dan hanya difokuskan pada penanggulangan sampah semata. Rancangan bantuan keuangan itu telah dikirimkan ke Kemenkeu oleh Pemda DIY. Pemerintah Pusat pun telah merespons permintaan bantuan itu dan menginformasikan untuk menunggu maksimal sebulan sejak komunikasi dijalin.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, mengatakan persoalan sampah sudah menjadi fokus utama kabupaten dan kota sejak desentralisasi sampah diberlakukan awal Mei lalu. Perkembangan penanganan di daerah selalu dipantau tetapi tidak secepat kilat agar benar-benar rampung secara keseluruhan.

Untuk itu, Pemda DIY sudah mengusulkan agar Pemerintah Pusat pun bisa membantu persoalan sampah yang sudah kadung berlarut-larut di DIY.

► Halaman 11

Tangani Sampah,...

"Kami minta dari Departemen [Kementerian] Keuangan untuk bisa membantu dengan cara membangun kerja sama. Sampah Jogja jadi bagian dari percontohan yang bisa dilakukan dari Kemenkeu," kata Sultan, Senin (10/6).

Menurut Sultan, Pemda DIY diminta menunggu kurang lebih sebulan agar Kemenkeu bisa mengkaji skema yang tepat dalam kerja sama soal penanganan sampah tersebut. Nantinya diharapkan ada subsidi dari Kemenkeu untuk penanganan sampah dengan skema khusus agar isu sampah tidak berlarut-larut dan segera terselesaikan.

"Kami harap bantuan itu bisa menyelesaikan semua. Kalau semua ini jadi tanggung jawab kabupaten dan provinsi nanti bebannya terlalu berat. Jadi yang untuk publik di luar sampah itu jadi sangat kecil [anggarnya]," jelas Sultan.

Sultan tak ingin kebijakan penanganan sampah menelan anggaran yang terlalu besar, tetapi perkembangannya tidak sesuai dengan harapan. "Saya tidak mau kalau sampah ini menghabiskan semua [anggaran]. Bagian yang mestinya untuk membangun yang lain dengan publik malah

berkurang," ujar dia.

Data Kebutuhan

Sekda DIY Beny Suharsono menyebutkan dalam kerja sama dengan Kemenkeu itu Pemda DIY diminta untuk mendata apa saja kebutuhan penanganan sampah yang diperlukan dari wilayah setempat. Sebulan sejak komunikasi dijalin, perkembangan soal bantuan itu harus sudah bisa menunjukkan hasil yang positif.

"Kemenku akan membantu, termasuk soal kajian, kan tergantung kecepatannya di kabupaten kota bagaimana. Oleh karena itu kolaborasi antara Pemda DIY dan kabupaten kota saya kira harus semakin optimal ke depan kalau anggaran ini terealisasi," kata dia.

Pemda DIY pun berencana untuk membuka kembali Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan untuk mengatasi persoalan sampah terutama di Kota Jogja. Namun, kapan TPST akan dibuka kembali secara terbatas masih belum diketahui.

Adapun depo-depo sampah di Kota Jogja pada Senin masih ditutup untuk pembuangan sampah. Banyak warga dan penggerobak sampah

yang kecele dengan penutupan depo-depo tersebut.

Menanggapi berbagai keluhan itu, Kabid Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja Ahmad Haryoko mengaku semua masukan telah tercatat. Nantinya, masukan-masukan itu akan dia sampaikan kepada atasannya untuk selanjutnya ditindaklanjuti. "Kami berterima kasih atas saran dan masukan, serta menjadikan ini sebagai koreksi. Sehingga bisa menjadi perbaikan dalam pelayanan ke masyarakat khususnya terkait dengan pengelolaan sampah," kata Haryoko.

Terkait dengan jadwal pembuangan sampah di depo, Haryoko meminta masyarakat untuk bersabar. Sebab, saat ini semua sarana pengolahan sampah di Kota Jogja sedang dalam proses penyelesaian. Targetnya, pembangunan itu selesai pada Juni ini. Namun, dia tak bisa memastikan kapan seluruhnya bisa beroperasi optimal. Jika dipaksakan, Haryoko khawatir pengolahan justru tidak maksimal. "Kami sedang berproses, semua *on the track*. Jadi sebisa mungkin masyarakat dapat memahami persoalan yang sedang terjadi saat ini," ujarnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005